



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI TAKENGON**

Jalan Yos Sudarso No. 200 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Kode Pos 24552 Telp.
(0643) 8001757 Fax (0643) 21606 . www.pn-takengon.go.id. Email : pnTakengon@gmail.com

PENGUMUMAN

**SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN NEGERI TAKENGON TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : 1923/PAN.PNW1-U15/HK2.2/XII/2025**

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan ini Pengadilan Negeri Takengon Membuka Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Umum

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum
Lingkup Pekerjaan : Pemberi Layanan Bantuan Hukum
Lokasi Pekerjaan : Pengadilan Negeri Takengon
Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 200 Blang Kolak II
Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah
Nilai Total HPS : Rp. 28.000.000
Sumber Dana : DIPA Pengadilan Negeri Takengon Tahun 2026
Formasi Penerimaan

1. Penyedia Jasa pada Pos Bantuan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi Hukum dan/atau unit kerja Advokasi Hukum pada organisasi profesi Advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.
2. Telah memiliki surat pengesahan pendirian badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.
3. Telah terakreditasi sebagaimana SK Menteri Hukum dan HAM.
4. Memiliki Kantor/Cabang/Perwakilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon.
5. Bersedia memberikan jasa layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Takengon selama tahun anggaran 2026 dan sesuai jam kerja pada Pengadilan Negeri Takengon.
6. Petugas pada Pos Bantuan Hukum adalah Advokat, S1 Hukum atau Sarjana Hukum Islam, yang menguasai Hukum dan Memiliki staf atau anggota yang memiliki gelar sarjana Hukum atau Sarjana Hukum Islam.

7. Petugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan yang bersangkutan dan tidak boleh berganti sampai akhir masa kontrak.
8. Penyedia telah terdaftar dalam Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia)

B. Persyaratan

1. Mengajukan surat penawaran yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon UP. Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2026 Pengadilan Negeri Takengon yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Penyedia telah terdaftar dalam APLIKASI SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia)
3. Berbentuk Badan Bantuan Hukum dengan melampirkan AKTA Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi.
4. Telah terakreditasi oleh kemenkumham RI.
5. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi ini, yaitu : Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor;
6. Surat Keterangan Domisili Lembaga;
7. Melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum.
8. Menyediakan minimal 2 orang petugas bantuan hukum di setiap ruangan sidang.
9. Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga
10. Melampirkan Bukti Setor Pajak Tahunan (SPT) 5 Tahun terakhir
11. Membuat surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas
12. Tidak masuk dalam daftar hitam
13. Bersedia mengikuti Tes Kompetensi
14. Bersedia menandatangani pernyataan tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi
15. Bersedia tunduk pada aturan dan ketentuan Pengadaan Jasa Posbakum di Pengadilan Negeri Takengon.

C. Pendaftaran, Waktu dan Tempat

1. Pemasukan Dokumen Penawaran
16 Desember 2025 sampai dengan 23 Desember 2025
2. Berkas Penawaran dan Lampirannya
Ditujukan Kepada :
Ketua Pengadilan Negeri Takengon UP.
Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2026 Pengadilan Negeri Takengon

D. Proses Pengadaan

1. Pembukaan Dokumen Penawaran : 16 Desember 2025
2. Evaluasi Dokumen Penawaran : 24 Desember 2025
3. Tes Kualifikasi : 29 Desember 2025

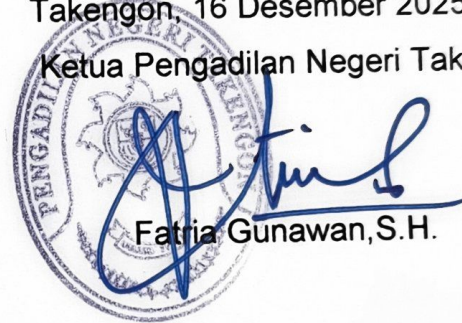
E. Penetapan Penyedia Jasa Dan Penandatanganan SPK

1. Penetapan Penyedia Jasa : 30 Desember 2025
2. Penandatanganan SPK : 2 Januari 2026

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Takengon, 16 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Takengon

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Negeri Takengon. The text 'PENGADILAN NEGERI TAKENGON' is visible around the perimeter of the stamp. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Fatria Gunawan, S.H.